

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan berperan penting dalam usaha menciptakan masyarakat yang beriman, berakhlak mulia, berilmu serta demokratis dan bertanggungjawab. Pendidikan merupakan sebuah kebutuhan mendasar dari setiap individu. Pendidikan pada hakekatnya merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara (Undang-Undang No. 20 tahun 2003 BAB I pasal 1).

Pendidikan yang berkualitas merupakan hak bagi setiap warga negara Indonesia. Hal ini ditegaskan pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 BAB IV pasal 5 ayat (1) yang berbunyi, “Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu”. Guna menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, Maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan pula.

Tujuan pembangunan nasional di Indonesia adalah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata, materil dan spiritual berdasarkan Pancasila. Tujuan itu sejalan dengan tujuan bangsa Indonesia yang terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 alinea 4, yaitu: a) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. b) Memajukan kesejahteraan umum. c) mencerdaskan kehidupan bangsa. d) Ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Guna mencapai tujuan nasional tersebut kualitas sumber daya manusia di Indonesia harus di tingkatkan pula. Peningkatan kualitas sumber daya manusia salah satunya melalui pendidikan yang bermutu. Berbagai upaya pemerintah telah dilakukan untuk peningkatan kualitas pendidikan. Namun, dunia pendidikan di Indonesia masih memiliki beberapa kendala yang berkaitan dengan mutu pendidikan diantaranya adalah keterbatasan akses pada pendidikan, jumlah guru yang belum merata, serta kualitas guru itu sendiri dinilai masih kurang. Terbatasnya akses pendidikan di

Indonesia, terlebih lagi di daerah berujung kepada meningkatnya arus urbanisasi untuk mendapatkan akses ilmu yang lebih baik di perkotaan.

Pendidikan dalam pelaksanaannya dibagi menjadi tiga jalur, yaitu pendidikan formal, pendidikan informal dan pendidikan non formal. Indonesia memiliki bermacam-macam lembaga pendidikan negeri dan swasta dari berbagai jenjang. Kondisi masyarakat Indonesia bermacam-macam pula adanya. Peserta didik yang pada dasarnya merupakan peserta dari penyelenggaraan pendidikan itu sendiri terdiri dari berbagai macam kondisi dan kemampuan. Peserta didik yang memiliki kondisi serta kemampuan rata-rata atau di atasnya maka akan ditempatkan pada sekolah reguler, namun bagi peserta didik yang memiliki kondisi serta kemampuan dibawah rata-rata akan ditempatkan pada sekolah berkebutuhan khusus. Sekolah dengan peserta didik yang berkebutuhan khusus sering disebut dengan Sekolah Luar Biasa. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 BAB IV pasal 5 ayat (2), “Warga negara yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus”.

Sekarang ini kondisi serta kemampuan yang dimiliki peserta didik pada sekolah berkebutuhan khusus tersebut sering dipandang sebelah mata oleh masyarakat pada umumnya. Kendatinya para penyandang cacat (*difabel*) memiliki hak untuk mengembangkan potensi serta bakat yang dimilikinya. Pendidikan luar biasa bertujuan untuk membekali para peserta didik dengan kebutuhan khusus agar mampu berperan aktif dalam masyarakat serta memiliki kontribusi yang positif dengan mengembangkan potensinya. Dijelaskan pada Undang-Undang No. 20 tahun 2003 BAB VI pasal 32 ayat (1), “Pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa”.

Berbagai macam serta jenjang pendidikan Sekolah Luar Biasa yang ada di Indonesia diantaranya SLB-A, SLB-B, SLB-C, dan SLB-D. Menurut Pristi (2013) SLB-A dkkhususkan bagi penyandang tunanetra, SLB-B dkkhususkan bagi penyandang tunarungu, SLB-C dkkhususkan bagi penyandang tunagrahita, dan SLB-D dkkhususkan bagi penyandang tunadaksa. Sekolah luar biasa juga terdapat berbagai

jenjang pendidikan yakni yakni, Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan kelas tambahan yaitu kelas khusus untuk anak penyandang autisme.

Jumlah penyandang cacat di Kota Surakarta bisa dikatakan tidak terlalu besar, yaitu 1.474 jiwa. Hal ini jika dibandingkan dengan jumlah penduduk Kota Surakarta yang sejumlah 563.659 jiwa. Bisa dikatakan bahwa jumlah penyandang cacat di Kota Surakarta sebesar 0,26%. Data tersebut tercantum tabel berikut:

Tabel 1.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kecacatan dan Kecamatan, Kota Surakarta

Jenis Kecacatan	Laweyan	Serengan	Pasarkliwon	Jebres	Banjarsari	Jumlah
Cacat fisik	70	32	57	104	131	394
Cacat netra/buta	24	10	22	50	44	150
Cacat rungu/wicara	34	16	39	64	82	235
Cacat mental/jiwa	51	36	64	83	111	345
Cacat fisik dan mental	13	11	4	22	25	75
Cacat lainnya	60	23	33	65	94	275
Jumlah	252	128	219	388	487	1.474

Sumber:

<http://dispendukcapil.surakarta.go.id/20XIV/index.php/2014-05-21-04-43-06/2014-05-21-08-47-11/kuantitas-penduduki/item/67-penduduk-sosial>

Meski jumlah penyandang cacat yang relatif kecil bukan berarti keberadaan penyandang cacat bisa diabaikan begitu saja. Meminimalkan perlakuan diskriminatif terhadap para penyandang cacat, mampu menimbulkan rasa percaya diri untuk mengikutsertakan diri pada kegiatan masyarakat pada umumnya.

Pada penelitian ini peneliti ingin mengetahui lebih lanjut mengenai media pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran dengan peserta didik berkebutuhan khusus (*difabel*) khususnya peserta didik yang menyandang Tuna rungu. Tuna rungu adalah individu yang memiliki hambatan dalam pendengaran baik permanen maupun tidak permanen. Hambatan pendengaran seorang individu

tunarungu juga mempengaruhi hambatan dalam berbicara. Guru dalam menyampaikan materi pelajaran harus memiliki media agar individu tersebut dapat memahami pelajaran yang disampaikan. Pada saat ini di beberapa sekolah sedang dikembangkan komunikasi total yaitu cara berkomunikasi dengan melibatkan bahasa verbal, bahasa isyarat dan bahasa tubuh. Guru merupakan salah satu komponen penting dalam proses pembelajaran, karena guru berperan sebagai kunci keberhasilan melaksanakan pendidikan. Bisa dikatakan bahwasannya guru merupakan ujung tombak tercapainya suatu tujuan pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan hendaknya dimulai dari peningkatan kualitas guru. Guru yang berkualitas harus memenuhi 4 kompetensi guru sebagaimana tercantum dalam UU No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 10 ayat (1) yaitu: 1) kompetensi pedagogik, 2) kompetensi kepribadian, 3) kompetensi sosial, dan 4) kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.

Suatu proses pembelajaran mengharuskan guru untuk membuat suatu susunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang disesuaikan dengan kebutuhan serta kondisi dari peserta didik. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Bab VI Pasal 19 menyebutkan bahwa:

Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Dalam proses pembelajaran memerlukan media belajar karena bukan hanya sekolah reguler saja yang menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan keadaan dan kondisi dari masing-masing peserta didik, sekolah luar biasa pun menggunakan media pembelajaran yang khusus disesuaikan dengan kondisi dari peserta didik berkebutuhan khusus. Proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga memiliki suatu media pembelajaran khusus yang diterapkan oleh guru mata pelajaran guna tercapainya tujuan pembelajaran. Penggunaan media pembelajaran yang tepat dengan kondisi kelas, akan mempermudah peserta dalam menerima pelajaran yang disampaikan oleh guru. Hal ini bertujuan agar tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan efektif.

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB) juga terdapat mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah adalah mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajibannya untuk menjadi warga negara Indonesia yang cerdas, terampil, dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945. Mata pelajaran PPKn adalah sebuah program untuk menanamkan nilai-nilai moral dan karakter dalam diri anak.

Proses penanaman moral pada peserta didik tidak hanya melalui pelajaran PPKn saja, melainkan bisa melalui proses motivasi dari guru dan terutama dari orang tua dalam proses mendidik anak dilingkungan keluarga. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan juga bertujuan untuk menumbuhkan rasa cinta tanah. Rasa cinta tanah air tidak hanya bisa diwujudkan oleh anak yang normal, melainkan anak dengan *difabel* juga bisa menerapkannya. Tidak dikesampingkan pula bahwasannya penanaman karakter tidak hanya mengacu pada proses pembelajaran PPKn, namun dapat terjadi diluar pembelajaran.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: Media Pembelajaran PPKn pada Anak Tuna Rungu di SMP Berkebutuhan Khusus (Studi Kasus SMP-LB Negeri Surakarta Tahun Ajaran 2015/2016).

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penggunaan media pembelajaran PPKn Pada anak tunarungu di SMP Berkebutuhan Khusus?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penerapan media pembelajaran PPKn pada anak tunarungu di SMP Berkebutuhan Khusus?
3. Bagaimana alternatif solusi yang digunakan atas kendala yang dihadapi dalam Pembelajaran PPKn pada anak tunarungu di SMP Berkebutuhan Khusus?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan titik pijak untuk merealisasikan apa yang akan dilaksanakan agar penelitian ini dapat terarah, maka dari itu perlu dirumuskan secara jelas. Adapaun tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan penggunaan media pembelajaran PPKn Pada anak tunarungu di SMP Berkebutuhan Khusus?
2. Untuk mendeskripsikan kendala yang dihadapi dalam penerapan media pembelajaran PPKn pada anak tunarungu di SMP Berkebutuhan Khusus.
3. Untuk mendeskripsikan alternatif solusi yang digunakan atas kendala yang di hadapi dalam penerapan media Pembelajaran PPKn pada anak tunarungu di SMP Berkebutuhan Khusus.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini baik secara praktis maupun teoritis adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi terhadap pengetahuan dalam dunia pendidikan mengenai penggunaan media pembelajaran PPKn anak tuna rungu di SMP Berkebutuhan Khusus, serta menjadi informasi bagi pihak yang membutuhkan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Sekolah

Sebagai masukan serta bahan pertimbangan dalam proses pembelajaran PPKn anak tuna rungu di SMP Berkebutuhan Khusus.

b. Bagi Guru

Sebagai masukan mengenai pemanfaatan media pembelajaran PPKn anak tuna rungu di SMP Berkebutuhan Khusus.

c. Bagi penulis

Sebagai masukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan penulis sebagai calon pendidik dan sebagai bahan acuan serta pertimbangan penelitian terutama dibidang pendidikan.